



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR :100.3/430/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH 3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Makassar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

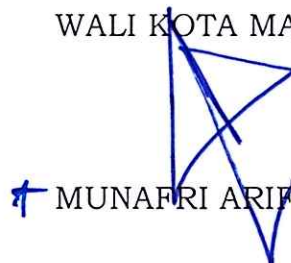
KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN KESDIPROKUR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. Pengulah Arifudin Mard.	Ar.
PELAKSANA	Ar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 09 Februari 2026

WALI KOTA MAKASSAR

  
MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PENILAIAN INDEKS REFORMASI  
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

- a. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Makassar
- b. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Makassar;  
2. Asma Suharti, S.H.;  
3. Muh. Awwal Muin, S.H.;  
4. Nur Winidiyah, S.H.;  
5. Ratu Umi S, S.H.;  
6. Eka Putri Nurhasanah, S.Kom.;  
7. Muh. Akbar, A.md.; dan  
8. Ikhwan Setiawan, S.H.

WALI KOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 100.3/430/Tahun 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PENILAIAN INDEKS REFORMASI  
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

URAIAN TUGAS  
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
  - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
  - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
  - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

WALI KOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN

